

DAFTAR PUSTAKA

- Aguspita, M., Marliyah, & Harahap, R. D. (2019). Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah kota medan.
- Anggraini, J. (2018). Hukum administrasi negara, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arafi. (2017). Pengelolaan keuangan daerah dalam perekonomian indonesia.
- Arifiyadi, T. (2021). Akuntabilitas, Jakarta: Salemba Humanika.
- Arikunto, S. (2014). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arya, M. P., Harmain, H., & Nurwani. (2021). Pengaruh pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap pencapaian kinerja business development centre (BDC) pada program kota tanpa kumuh (kotaku) provinsi sumatera utara.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2023). Kegiatan dan sasaran kegiatan perwakilan BPKP provinsi Bengkulu. Renstra Final Pwk Bengkulu.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2023). Kendala dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan. Laporan Kinerja BPKP Tahun 2023.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2023). LHP (Laporan hasil pengawasan) Manajemen Risiko BPKP Tahun 2023
- Bohari. (2015). Hukum anggaran negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dorfman, J. (2020). Manajemen risiko, Jakarta: Salemba Humanika.
- Edowai, M., Abubakar, H., Said. M. (2021). Akuntabilitas & transparansi pengelolaan keuangan daerah. CV. Berkah Utami.
- Fahmi, I. (2020). Manajemen risiko. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sunah di dapat Hadis Riwayat At-Tirmidzi Tentang pengawasan.

- Hamid, A. (2020). Peran dan kedudukan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam sistem pengawasan keuangan negara.
- Harahap, E. J., Nasution, Y. S. J., & Nurwani. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten padang lawas utara (Studi kasus di badan pengelolaan keuangan pendapatan daerah kabupaten padang lawas utara tahun 2015-2019).
- Harahap, R. F. (2017). Peranan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah di kabupaten labuhan batu.
- Harahap, R. F., Nurlaila, & Lubis, F. A. (2018). Pengaruh kompetensi dan independensi auditor, terhadap kualitas audit pada kantor perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan provinsi sumatera utara.
- Harmain, H., Daulay, A. N, & Enre, D. T. (2016). Analisis value for money anggaran pendapatan pada pemerintah kota medan.
- Herdiansyah, H. (2012). Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2020). Manajemen risiko 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang BPKP.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Indonesia. Peraturan Perppres No. 192 Tahun 2014 Pasal 20 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
- Karianga, H. (2015). Analisis value for money anggaran pendapatan pada pemerintah kota medan.
- Karianga, H. (2015). Hukum politik dalam pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusmilawaty. (2019). Analisis anggaran sebagai alat pengawasan pajak reklame pada dinas pendapatan daerah kota medan, KITABAH. Vol.3. No.1.
- Latif, H. A. (2014). Hukum administrasi dalam praktik tindak pidana korupsi. Jakarta: Prenada Media Group.

- Lubis, A. W. (2021). *Pemeriksaan kinerja sektor publik*.
- Mahmudi. (2020). *Akuntabilitas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahsun. (2020). *Pengelolaan keuangan negara*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). *Pengelolaan keuangan desa dan sistem akuntansi keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa sibito*, Jimea Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi) Vol 7 no. 3.
- Rifed, M. (2016). *Pengaruh time budget pressure terhadap kualitas audit dengan penghentian prematur prosedur audit oleh auditor sebagai variabel intervening*.
- Ritonga, M. H., Nasution, M. I. F., & Harahap, R. D. (2020). *Pengaruh sistem komputerisasi akuntansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pada desa yang ada di kecamatan dolok sigompulon)*.
- Saidi. M. J. (2020). *Hukum keuangan negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saleh, S. (2020). *Akuntabilitas*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sanjaya, W. (2013). *Penelitian pendidikan: jenis, metode, dan prosedur*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setyaningrum, D. (2020). *Analisis pengaruh peran badan pengawasan dan pembangunan terhadap opini*.
- Situs Resmi BPKP. (2017). *Konten dari kegiatan di BPKP*. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2023.
- Smith, M. L. (2020). *Manajemen risiko*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekarwo. (2014). *Hukum pengelolaan keuangan daerah*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Soleh, C. & Rochmansjah, H. (2020). *Pengelolaan keuangan dan aset daerah*. Bandung. Fokusmedia.

- Sugiharto, S., & Syaifullah, M. (2023). Pengawasan dalam perspektif islam dan manajemen. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sugiyono. (2018). Metodologi penelitian kualitatif, Bandung : Alfabeta.
- Sukardja, A. (2015). Hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Jakarta: Timur: Perancang Kulit Pena Grafika.
- Sukma, N. R., Ridwan, M., & Syafina, L. (2021). Pengaruh penerapan good governance dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada BPKAD provinsi sumatera utara.
- Sunggono, B. (2011). Metodologi penelitian hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Swasanany. (2020). Akuntabilitas kinerja. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Syamsir, & Torang. (2014). Perilaku, struktur, budaya & perubahan organisasi, Jurnal Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Tohirin. (2012). Metode penelitian kualitatif dalam pendidikan dan bimbingan konseling. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wulandari, H. (2017). Peran badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.
- Yushita. (2020). Pengelolaan keuangan dan pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika.

LAMPIRAN



Perjalanan BPKP Mengawal Pembangunan Nasional

1936

Sejarah BPKP berawal pada tahun 1936 dengan tertinya Dekret Nomor 44 Tanggal 31 Oktober 1936 yang menugaskan **Rekening Accountant/Inspektur** (Djawatan Akademi Negara).

Unit kerja ini memiliki tugas melakukan penelitian terhadap pembukuan berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu.

1945

Praja kemerdekaan RI, Rekening Accountant/Inspektur atau Djawatan Akademi Negara (DAN) tetap bekerja seperti era Pemerintahan Hindia Belanda, dan berada di bawah **Thesauri Jenderal - Kementerian Keuangan**.

Fungsi DAN adalah sebagai alat pemertama yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntansi bagi pemerintah atau instansi atau instansi pemerintah, swasta, dan instansi di bawah kekuasaannya.

1966

Pada tahun 1966 tertbit Keputusan Presiden Nomor 329 Tahun 1966. Kementerian ini mengubah Djawatan Akademi Negara menjadi **Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Negara (DDPKN)**. Tugas DDPKN meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha. Selanjutnya DDPKN disebut **DPKN**.

1983

Untuk mempersiapkan independensi DPKN, maka unit kerja selingkit eselon 1 ini diubah menjadi sebuah badan dengan nama **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** melalui Keputusan Nomor 31 Tahun 1983. BPKP memiliki kewenangan melakukan audit atas seluruh pengelolaan keuangan negara dan menjadi koordinator AFP di Indonesia.

2001

Tertbit Keputusan No 103 tahun 2001 tentang Lembaga Pemantahan Non Departemen. BPKP berperan sebagai **Pengawas Keuangan dan Pembangunan** (seperti dengan penempatan Otonomi Daerah, BPKP lebih banyak menjalankan peran consulting, terutama dalam membantu KADMI dalam menerapkan UU Keuangan Negara).

2008

Tertbit PP 62/2008 tentang SPP. BPKP mendapat tugas sebagai **Pengawas Intern Akuntabilitas Keuangan Negara** atas kegiatan tertentu, dan menjadi **Pemantau Penyelenggaraan SPP**.

Tugasnya PP ini meliputi: memantau pelaksanaan target kuantitatif dan penyediaan kualitas bagi instansi pemerintah lainnya. Peran baru ini membuat jenis layanan BPKP pada instansi lain lebih bervariasi sesuai kebutuhan setiap instansi, seperti evaluasi kebijakan, bimbingan penyusunan laporan keuangan, dan...

2011

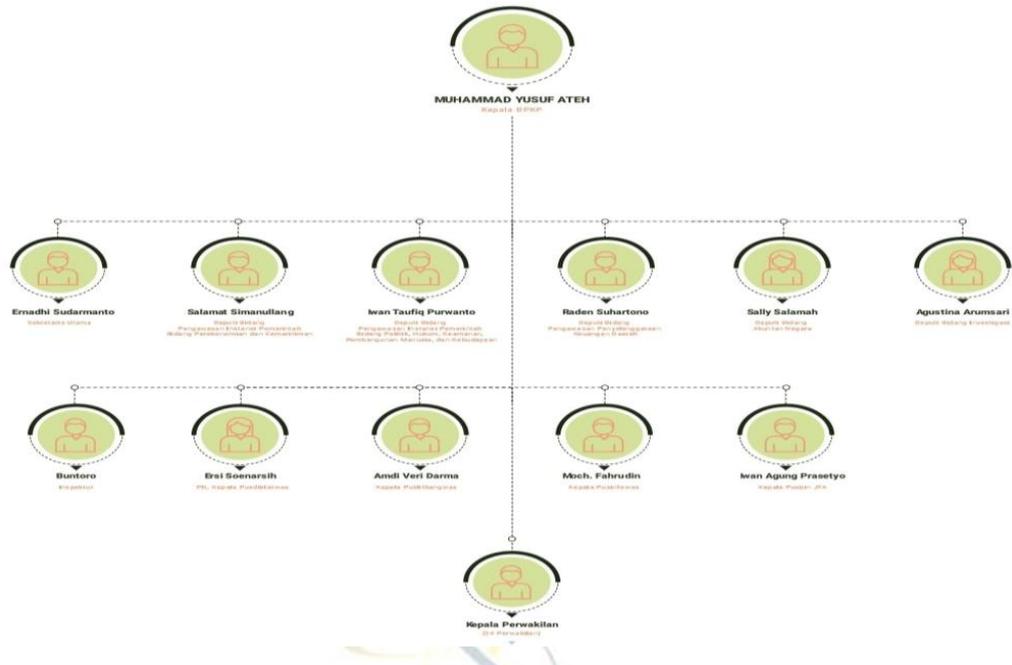
Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas keuangan negara, Presiden melalui Instruksi No. 4 Tahun 2011 tentang **Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara** menginstruksikan BPKP melakukan asistensi kepada kementerian / lembaga / pemda untuk meningkatkan pemantauan dalam pengelolaan keuangan negara / daerah, terutama terhadap penyusunan anggaran kementerian / lembaga / pemda, audit terhadap program strategis nasional, dan rencana cadai dalam mendorong penyelenggaraan SPP di kementerian / lembaga / pemda.

2014 - ...

Pengawasan Pembangunan Nasional dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

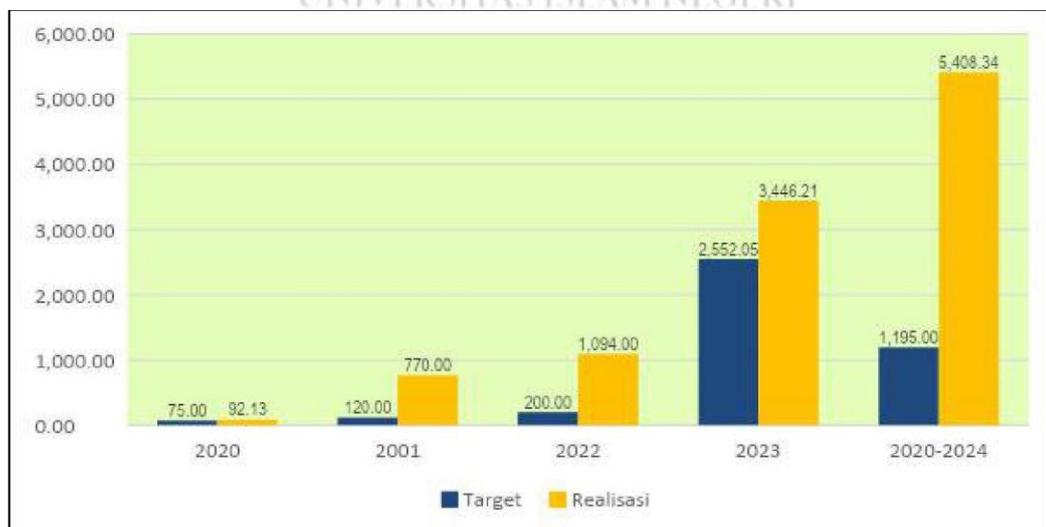
www.bpkp.go.id

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan 1							
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah							
1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rp Juta	75	120	200	350	450
2	Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rp Juta	150	400	550	600	750
3	Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rp Juta	1.123	186.779	154.478	136.270	112.939
4	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	Rp Juta	54.249	81.357	99.430	113.000	103.964
5	Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rp Juta	0	118	120	122	125
6	Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rp Juta	0	59	60	61	62

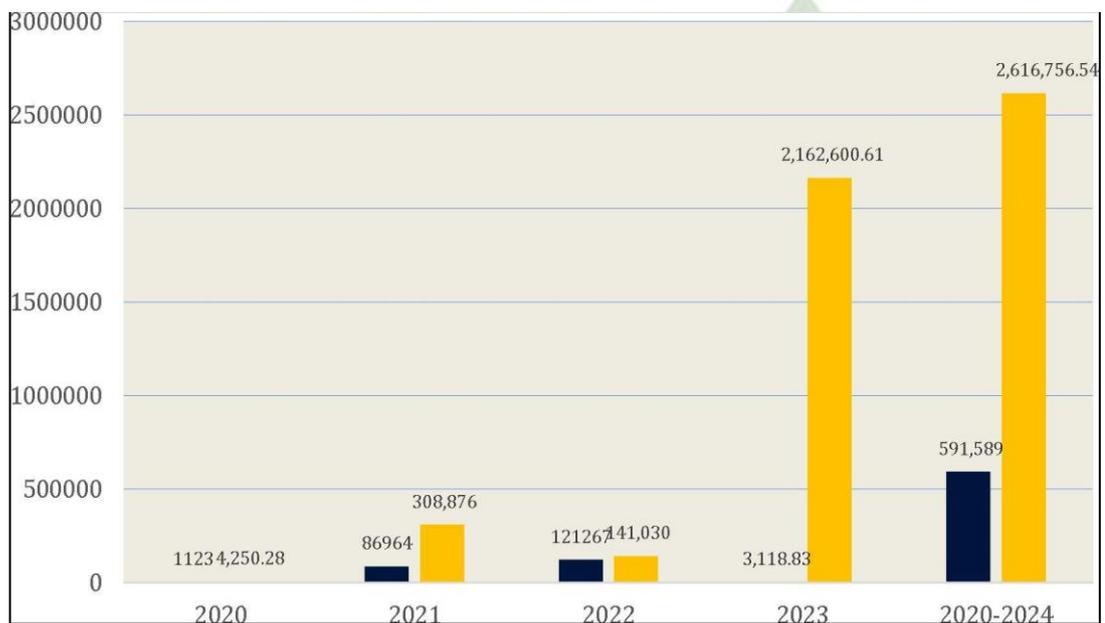


No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1.1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rp (Juta)	2.552,05	3.446,21	135,04	★
1.2	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp (Juta)	136.270,00	2.162.600,61	1.587,00	★
1.3	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	Rp (Juta)	42.388,43	43.499,41	102,62	★

UNIVERSITAS ISLAM Negeri



No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran pada pemda Prov/Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bengkulu atas Sektor Pariwisata, Sektor Ketahanan Pangan, Sektor Pengentasan Kemiskinan, Sektor UMKM dan Sektor Penanganan Stunting tahun 2023	2.074.059.634.758,00
2.	Evaluasi atas Efektivitas Penggunaan Dana Transfer ke Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu	237.002.612,51
3.	Evaluasi atas Efektivitas Penggunaan Dana Transfer ke Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Bengkulu Utara	9.532.270,45
4.	Audit Penyesuaian Harga atas Kontrak Nomor DPBJT/FE.2254H/S.Perj.38/IX/2019 tanggal 3 September 2019 pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu, Seksi Bengkulu-Taba Penanjung Periode bulan September 2020 sampai dengan Maret 2022	88.293.989.943,00
Jumlah		2.162.600.159.583,96

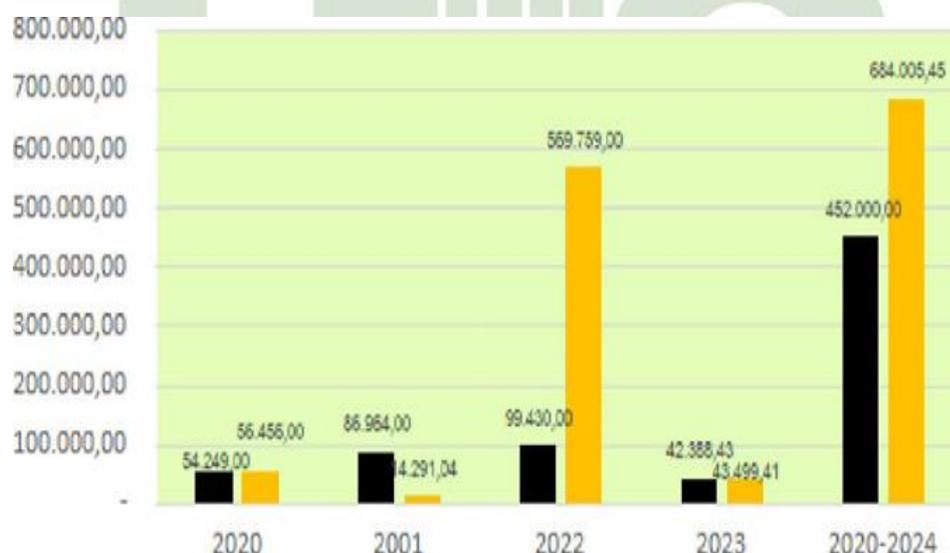


No	Uraian	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah (Rp)
I	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)	
1	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Program SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang Dilaksanakan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri, Koperasi Sanip Mandiri, dan Koperasi Sekip Mandiri	1.073.461.309,00
2	Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Revitalisasi dan Pengembangan Gedung Asrama Haji Bengkulu yang dilaksanakan PT Bahana Krida Nusantara Tahun Anggaran 2020	1.286.549.934,73
3	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022	1.568.129.601,27
4	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang)/Badan Perencanaan Pembangunan	203.816.200,00

SUMATERA UTARA MEDAN

No	Uraian	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah (Rp)
	Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2014.	
5	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada 16 Puskesmas di Kabupaten Kaur Untuk Belanja Makan Minum Dan Alat Tulis Kantor Tahun Anggaran 2022	406.649.688,00
6	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pemberian Kredit Yasa Griya (KYG) oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Bengkulu kepada PT Rizki Pabittei tahun 2015 sampai dengan tahun 2020	4.938.000.000,00
7	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 Dan Tahun 2022	1.487.171.877,00
8	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020	1.612.606.163,56
9	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021-2022 dan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan	323.360.000,00
10	Audit Tujuan Tertentu atas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara	29.261.533.489,00
	Jumlah I	42.161.278.262,56
II	Audit Kinerja, Audit Tujuan Tertentu dan Audit Keuangan	
1	Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)/National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan Islamic Development Bank (IsDB) No. IND-176 untuk Pelaksanaan Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK)/Livelihood pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu Tahun Anggaran 2022	10.213.200,00
2	Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)/National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan Islamic Development Bank (IsDB) Nomor IND-174 dan IND-175 untuk Pembayaran Gaji, BOP, dan Vocational Training pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu Tahun Anggaran 2022	8.854.000,00
3	Audit Dukungan atas Paket Pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Ruas Jalan Betungan-Tais dan Ruas Jalan Tais-Maras di Kabupaten Seluma pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu TA 2022	845.100.044,00

No	Uraian	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah (Rp)
4	Audit atas Paket Pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Pengadaan Vitamin Suportif dan Obat-obatan serta Logistik Medik Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Provinsi Bengkulu TA 2022	43.752.040,00
5	Audit atas Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Bengkulu 1 pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bengkulu Tahun Anggaran 2022-2023	411.904.083,49
6	Audit atas Paket Pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Pengadaan Vitamin Suportif dan Obat-obatan serta Logistik Medik Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Provinsi Bengkulu TA 2022	18.272.722,53
Jumlah II		1.338.132.090,02
Total Nilai Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah		43.499.410.352,58





SUM

RI EDAN